

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfiatun Ni'mah (2011), salah satu fungsi bank yang paling penting adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Finance Intermediary Institution*), dimana bank sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pendanaan yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*Surplus Spending Unit*) dan menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*Deficit Spending Unit*) dimana salah satunya adalah dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memeberikan jasa kepada bank lain.

Bank jangkar atau *anchor bank* adalah proses pemenuhan modal inti, apabila secara individual terdapat bank-bank yang belum memungkinkan untuk memenuhi target-target modal tersebut, ditawarkan opsi agar bank-bank tersebut terlibat aktif dalam proses merger dan akuisisi. "Dalam konteks ini, Bank Indonesia

memperkenalkan konsep Bank Jangkar, yaitu Bank dengan Kinerja yang Baik (BKB) dan berpotensi, serta memiliki inisiatif untuk melakukan akuisisi terhadap bank lain," (Burhanuddin, 2005). BKB adalah bank yang selama tiga tahun terakhir memenuhi empat kriteria. Pertama, modal inti lebih besar dari Rp 100 miliar. Kedua, bank memiliki tingkat kesehatan dengan kriteria CAMELS tergolong sehat (sekurang-kurangnya peringkat komposit dua) dengan faktor manajemen tergolong baik. Ketiga, memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (CAR) sebesar 10 persen. Keempat, memiliki tata kelola (*governance*) dengan *rating* yang baik. Status BKB tersebut akan dievaluasi Bank Indonesia secara berkala. Bank dengan status BKB tersebut selanjutnya berpotensi untuk menjadi Bank Jangkar apabila memenuhi kriteria memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, bank tersebut perlu didukung dengan permodalan yang kuat dan stabil, serta memiliki kemampuan mengabsorpsi risiko dan mendukung kegiatan usaha (Info Bank No. 314 : Mei 2005).

Menurut Anggara Lukita (2005) yang dikutip dari www.detikfinance.com pertama, minimum CAR 12 persen dan rasio modal inti minimum (*tier 1*) 6 persen. Kedua, bank juga memiliki kemampuan untuk tumbuh secara berkesinambungan, yang tercermin dari profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari rasio Return on Asset (ROA) minimal 1,5 persen. Ketiga, bank berperan dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan guna mendorong pembangunan ekonomi nasional, yang tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ada pun pertumbuhan ekspansi kredit secara riil minimum 22 persen per tahun atau LDR minimum 50 persen dan

rasio *non-performing loan* (NPL netto) di bawah 5 persen. Keempat, bank telah menjadi perusahaan terbuka, atau memiliki rencana untuk menjadi perusahaan terbuka dalam waktu dekat. Kelima, bank memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi konsolidator, dengan tetap memenuhi kriteria sebagai BKB.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat, pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun dalam konteks ini Bank Indonesia memperkenalkan konsep Bank Jangkar, yaitu Bank dengan kinerja yang baik dan berpotensi untuk melakukan akuisisi terhadap Bank lain. Salah satu kriteria agar suatu Bank dapat dikatakan sebagai Bank Jangkar adalah Pertumbuhan Kredit Minimal 22 persen tiap tahunnya. Tetapi pada kenyataannya, Bank Pembangunan Daerah di Indonesia masih belum semua pertumbuhan kreditnya mencapai angka 22 persen. Apabila dilihat dari rata-rata tren secara keseluruhan, pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia hanya mencapai angka 19 persen. Dengan angka rata-rata pertumbuhan kredit 19 persen, Bank pembangunan Daerah di Indonesia masih belum bisa dikatakan Bank dengan kinerja baik yang berpotensi untuk melakukan akuisisi terhadap bank lain. Seharusnya apabila Bank ingin dikatakan sebagai bank dengan kinerja baik atau dinyatakan sebagai bank jangkar dengan angka pertumbuhan kredit minimal 20. hal ini yang menyebabkan peneliti ingin mengetahui fakto-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan kredit.

Tabel 1.1
TABEL PERTUMBUHAN KREDIT (tren dalam persen)

BPD	2009	2010	Tren	2011	Tren	2012	Tren	2013*	Tren	Rata-rata Tren
ACEH	6.395.137	7.441.624	0,16	8.228.058	0,11	8.549.509	0,04	8.774.764	0,03	0,08
BALI	5.552.950	6.261.201	0,13	7.273.552	0,16	7.286.808	0,00	9.377.109	0,29	0,14
BNGKULU	1.203.624	1.035.723	-0,14	1.320.176	0,27	1.367.921	0,04	2.244.575	0,64	0,20
DKI	7.003.505	8.091.986	0,16	9.850.598	0,22	13.469.937	0,37	14.755.881	0,10	0,21
JABAR	19.631.968	22.066.317	0,12	26.998.466	0,22	26.870.077	0,00	41.650.741	0,55	0,22
JAMBI	1.143.123	1.317.390	0,15	1.615.625	0,23	1.629.956	0,01	2.578.089	0,58	0,24
JATENG	10.691.600	11.595.193	0,08	13.482.612	0,16	18.091.893	0,34	20.261.171	0,12	0,18
JATIM	10.124.280	12.939.596	0,28	15.921.114	0,23	18.278.255	0,15	20.128.829	0,10	0,19
JOGJA	1.945.984	2.158.962	0,11	2.703.647	0,25	3.192.071	0,18	3.336.665	0,05	0,15
KALBAR	3.095.020	3.766.156	0,22	4.579.730	0,22	4.599.345	0,00	5.987.292	0,30	0,18
KALSEL	2.399.505	2.705.566	0,13	3.290.267	0,22	3.385.066	0,03	5.231.579	0,55	0,23
KALTENG	1.418.734	1.721.064	0,21	1.991.436	0,16	1.998.051	0,00	2.416.840	0,21	0,15
KALTIM	7.280.702	8.958.768	0,23	11.179.661	0,25	14.410.559	0,29	16.767.401	0,16	0,23
LAMPUNG	1.286.310	1.525.941	0,19	1.956.893	0,28	1.969.797	0,01	2.767.795	0,41	0,22
MALUKU	1.399.218	1.692.166	0,21	1.996.984	0,18	2.059.429	0,03	2.592.522	0,26	0,17
NTB	1.656.331	1.944.277	0,17	2.619.592	0,35	2.641.061	0,01	2.967.262	0,12	0,16
NTT	2.819.843	2.874.494	0,02	3.807.784	0,32	3.790.762	0,00	4.663.980	0,23	0,14
PAPUA	2.799.709	3.767.467	0,35	5.220.031	0,39	8.198.759	0,57	9.858.436	0,20	0,38
RIAU	6.728.943	7.036.042	0,05	8.317.832	0,18	8.369.968	0,01	10.455.866	0,25	0,12
SULTENGG	865.129	948.480	0,10	1.236.979	0,30	1.247.907	0,01	1.880.850	0,51	0,23
SULSEL	3.385.767	4.371.300	0,29	5.133.135	0,17	5.176.935	0,01	5.940.590	0,15	0,16
SULTENG	517.818	542.612	0,05	565.842	0,04	754.178	0,33	920.779	0,22	0,16
SULUT	2.237.999	3.044.430	0,36	3.686.071	0,21	3.687.872	0,00	5.292.373	0,44	0,25
SUMBAR	5.910.683	6.850.600	0,16	8.580.361	0,25	9.877.653	0,15	10.866.912	0,10	0,17
SUMSEL	5.198.978	6.622.749	0,27	8.258.827	0,25	8.493.259	0,03	10.430.638	0,23	0,19
SUMUT	8.387.920	9.158.464	0,09	11.001.262	0,20	10.989.485	0,00	14.700.374	0,34	0,16
Rata-rata tren			0,16		0,22		0,10		0,27	0,19

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi (www.bi.go.id) *data per juni 2013

Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, maka bank umum perlu memperhatikan sumber dana pihak ketiga, pertumbuhan ekuitas, giro wajib minimum, serta faktor eksternal seperti suku bunga dan inflasi.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank. Menurut (Kasmir, 2012 : 53) dana pihak ketiga adalah sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Serupa dengan penelitian Sri Haryati (2009) pertumbuhan dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian bank diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga meskipun terjadi krisis ekonomi, masyarakat tetap percaya menempatkan dananya dan atau mempertahankan simpanannya di bank. Dana pihak ketiga adalah salah satu sumber perolehan dana bagi bank. Sumber dana pihak ketiga berasal dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan kredit adalah positif, karena apabila pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami penurunan, maka bank akan mengalami penurunan juga terhadap sumber dana untuk membiayai kredit. Hal ini akan berdampak pada kredit yang akan mengalami penurunan juga.

Modal bank dapat digolongkan atas dua golongan besar, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti biasa pula disebut sebagai modal sendiri, karena dananya berasal dari pemilik (Herman Darmawi, 2012 : 84). Apabila modal dalam suatu bank besar jumlahnya, dalam artian modal inti yang terdiri dari modal disetor tinggi maka akan meningkat pula pertumbuhan kredit pada bank tersebut.

Tingginya pertumbuhan ekuitas atau modal dalam bank tersebut membuat para deposan merasa lebih aman karena terjamin simpanannya dalam bank tersebut, dan bank memiliki kemampuan permodalan untuk menyerap kerugian risiko kredit sehingga bank dapat meningkatkan pertumbuhan kreditnya. Berdasarkan penjelasan ini, maka pertumbuhan ekuitas memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, maka para penyimpan dana akan merasa lebih aman menitipkan dananya pada bank. Karena pada dasarnya modal berfungsi untuk mengcover seluruh resiko yang terjadi di bank.

Berdasarkan PBI nomor 12/19/PBI/2010 pengendalian tekanan inflasi serta pengelolaan kondisi eksese likuiditas perbankan yang tinggi dan persisten, merupakan hal yang sangat diperlukan agar tidak berdampak pada peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu stabilitas moneter. Selain itu, stabilitas sektor keuangan perlu terus didukung oleh penguatan kondisi sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko dan pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan adalah melalui penerapan kewajiban memelihara giro wajib minimum. Penerapan kebijakan giro wajib minimum perlu disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan serta dengan memperhatikan peran bank dalam pelaksanaan fungsi intermediasi sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan dan kemampuan intermediasi perbankan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengatur

kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum. Apabila BI menetapkan untuk meningkatkan GWM, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya sumber dana bank untuk membiayai kredit sehingga kemampuan bank untuk meningkatkan pertumbuhan kredit menjadi turun. Berdasarkan penjelasan ini, maka GWM memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit.

Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Apabila Bank Indonesia menurunkan *BI Rate*, maka suku bunga simpanan dan kredit perbankan akan mengalami penurunan. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada

perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Menurunnya *BI Rate* yang dapat berdampak pada penurunan suku bunga pasar akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyerap kredit sehingga bank dapat meningkatkan pertumbuhan kreditnya. Berdasarkan penjelasan ini maka *BI Rate* memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit.

Inflasi sebagai indikator makro dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kredit. Dalam lalu lintas pembayaran perbankan, apabila inflasi meningkat sangat besar akan berpengaruh kepada tingkat suku bunga yang ada pada perbankan. Apabila tingkat suku bunga yang ada pada bank meningkat, membuat masyarakat kurang berminat untuk melakukan pinjaman dengan alasan angsuran dan bunga kredit yang besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pertumbuhan kredit pun akan berangsur menurun seiring meningkatnya inflasi, sehingga inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit.

Hal inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian mengenai pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam hubungannya dengan likuiditas, inflasi, ekuitas dan pertumbuhan dana pihak ketiga agar bank pembangunan daerah di Indonesia dapat mencapai kriteria bank jangkar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan ekuitas, Giro Wajib Minimum, *BI Rate*, dan Inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan dana pihak ketiga secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
3. Apakah pertumbuhan ekuitas secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
4. Apakah Giro Wajib Minimum secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia?
5. Apakah *BI Rate* secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
6. Apakah inflasi secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
7. Manakah diantara variabel-variabel tersebut yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui signifikansi pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan ekuitas, Giro Wajib Minimum, *BI Rate*, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
2. Mengetahui signifikansi pengaruh positif pertumbuhan dana pihak ketiga secara parsial terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
3. Mengetahui signifikansi pengaruh positif pertumbuhan ekuitas secara parsial terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
4. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif GWM secara parsial terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
5. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif *BI Rate* secara parsial terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
6. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif inflasi secara parsial terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
7. Mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang analisis pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan ekuitas, Giro Wajib Minimum, *BI Rate*, dan Inflasi terhadap pertumbuhan kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

1. Manfaat bagi industri perbankan di Indonesia yaitu dapat memberi masukan dalam menentukan penyaluran kredit agar dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan kredit.
2. Manfaat bagi peneliti disini adalah menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perbankan serta untuk menerapkan teori-teori yang sudah ada dan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan.
3. Manfaat bagi STIE Perbanas adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Serta dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan bagi mahasiswa yang akan mengambil topik penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang berisikan lima bab dimana bab satu sampai lima saling terkait. Sistematika penulisan ini berisikan tentang materi-materi di tiap-tiap bab yang dibahas dalam penelitian ini. Sistematika penulisannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini secara umum berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran subyek penelitian, menganalisis data yang mencakup analisis deskriptif dan pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran tentang hasil penelitian.

